

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KELURAHAN TAMBRAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

Ruli Bahtiar

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, ruli.23534@mhs.unesa.ac.id

Tauran

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, tauran@unesa.ac.id

Abstrak

Program Sembako merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada empat indikator efektivitas: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dari Lurah, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan, Pendamping Sosial Kecamatan Magetan, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Kelurahan Tambran bervariasi. Ketepatan sasaran dan sosialisasi program dinilai belum efektif karena masih terdapat kelompok sasaran yang belum menerima bantuan dan informasi belum tersampaikan secara utuh kepada KPM. Namun, program ini efektif dalam hal tujuan dan pemantauan program, di mana bantuan berhasil disalurkan kepada KPM yang berhak, berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga mereka, serta adanya mekanisme pemantauan yang cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan verifikasi data KPM secara berkala dan perbaikan komunikasi terkait jadwal penyaluran bantuan untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Efektivitas, Program Sembako, Kelurahan Tambran.

Abstract

The Sembako Program is one of the Indonesian government's efforts to address poverty and improve community welfare through food assistance distribution. This research aims to analyze the effectiveness of the Sembako Program implementation in Tambran Village, Magetan District, Magetan Regency. The research method used is descriptive qualitative, focusing on four effectiveness indicators: program target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring. Data was collected through interviews, observations, and document studies from the Village Head, Head of Village Social Welfare Section, Magetan District Social Assistant, and Beneficiary Families (KPM). The research results show that the effectiveness of the Sembako Program implementation in Tambran Village varies. Target accuracy and program socialization are considered not yet effective because there are still target groups who have not received assistance and information has not been fully conveyed to KPM. However, this program is effective in terms of program objectives and monitoring, where assistance has been successfully distributed to eligible KPM, contributing to meeting their families' food and nutrition needs, and having a fairly good monitoring mechanism. This research recommends improving periodic KPM data verification and improving communication regarding assistance distribution schedules to enhance overall program effectiveness.

Keywords: Poverty, Effectiveness, Sembako Program, Tambran Village.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan fundamental yang terus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kondisi kekurangan materi, tetapi juga ketidakmampuan individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, baik secara fisik maupun ekonomi (Pinontoan, 2020). Kompleksitas permasalahan kemiskinan menuntut

penanganan yang komprehensif dan melibatkan kolaborasi optimal dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Peran pemerintah sangat krusial dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman untuk mendorong pembangunan dan menanggulangi kemiskinan secara maksimal (Anggleni, 2018).

Salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan adalah melalui

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kini telah bertransformasi menjadi Program Sembako. Program ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menekankan pentingnya koordinasi terpadu dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. BPNT sendiri awalnya diatur dalam Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Putri, 2021).

Transformasi dari program sebelumnya, Beras Sejahtera (RASTRA), menjadi BPNT dan kemudian Program Sembako, didasari oleh berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. World Bank (2014) mencatat bahwa program RASTRA masih menghadapi isu ketidaksesuaian penerima manfaat, kuantitas beras yang tidak memadai, dan kualitas beras yang cenderung buruk (Manalu, 2019). Menindaklanjuti hal ini, pemerintah melakukan perubahan skema program menjadi BPNT yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial pangan dan memperkuat perlindungan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) kemudian mentransformasi BPNT menjadi Program Sembako, yang mulai berlaku sejak awal tahun 2020 (Tempo, 2020).

Program Sembako dirancang dengan beberapa tujuan utama. Pertama, meringankan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membantu pemenuhan sebagian kebutuhan pangan mereka. Kedua, meningkatkan nutrisi yang seimbang bagi KPM. Ketiga, meningkatkan efektivitas program dengan memastikan ketepatan sasaran dan waktu penyaluran bantuan pangan. Keempat, memberikan fleksibilitas dan kontrol kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka (Kemensos RI, 2020). Pemerintah juga memperluas indeks bantuan Program Sembako dengan menaikkan nilai bantuan sosial dan memperbanyak jenis komoditas yang bisa dibeli. Jika sebelumnya hanya mencakup beras dan telur, kini KPM dapat memperoleh berbagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya, seperti daging ayam, jagung, kacang-kacangan, daging sapi, sayur-mayur, atau buah-buahan. Komoditas ini bisa diperoleh di pasar lokal, sebagai upaya pemerintah untuk memastikan KPM memiliki akses lebih luas terhadap bahan pokok bergizi (djpb kemenkeu, 2020).

Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, nilai bantuan Program Sembako dinaikkan mulai Maret 2020. Dari Rp150.000 per KPM per bulan menjadi Rp200.000 per KPM per bulan (djpb kemenkeu, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2023, penyaluran Program Sembako tidak lagi menggunakan mekanisme bantuan barang melalui E-Warung. Bantuan sosial kini menggunakan mekanisme nontunai, di mana setiap KPM menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang langsung ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau rekening milik KPM. KKS berfungsi sebagai kartu penanda bagi KPM yang digunakan sebagai rekening bank untuk mencairkan dana

bansos dalam bentuk uang melalui ATM di bank-bank Himpunan Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BSI, atau melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Metode penyaluran ini memberikan keleluasaan bagi KPM untuk melakukan penarikan uang melalui ATM dan berbelanja barang kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhannya tanpa melalui E-Warung (Kemensos RI, 2023).

Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, adalah salah satu lokasi penerima bantuan program ini. Namun, di Kelurahan Tambran, belum tersedia ATM Himbara untuk penarikan bansos program sembako, sehingga KPM harus melakukan penarikan uang melalui ATM di kelurahan tetangga, yaitu Kelurahan Kebonagung. Selain itu, informasi mengenai jadwal pencairan saldo masuk ke rekening juga tidak memiliki waktu yang pasti, menyebabkan KPM harus berulang kali mengecek ATM. Seperti yang diungkapkan oleh MSY, salah satu KPM penerima program sembako: "Tidak ada pemberitahuan tentang jadwal penyaluran program sembako masuk ke rekening, sehingga KPM harus bolak-balik mengecek saldo ke ATM."

Isu lain yang muncul adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK atas program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2021, ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial senilai Rp6,93 triliun. Permasalahan ini muncul karena bantuan sosial diberikan kepada KPM yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun usulan pemerintah daerah dari Sistem Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga disebabkan oleh KPM yang bermasalah di tahun sebelumnya namun tetap menerima bantuan, KPM yang seharusnya sudah dinon-aktifkan, KPM yang dilaporkan meninggal dunia, serta adanya KPM yang menerima bantuan ganda. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga mencatat 28 pengaduan terkait bantuan sosial sepanjang tahun 2020, sebagian besar berkaitan dengan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria. Ditemukan pula permasalahan lain, seperti potongan dana bantuan sosial dengan dalih pengganti ongkos yang dilakukan oleh oknum aparat setempat (Purnama, 2022).

Dalam aplikasi SIKS-NG Kelurahan Tambran Tahun 2024, warga yang masuk DTKS berjumlah 151 KK dan 380 Individu. Namun, jumlah KPM Program Sembako di Kelurahan Tambran hanya 61 KPM. Dari jumlah tersebut, terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran penerima program sembako, di mana masih ada warga yang secara ekonomi cukup mampu masuk sebagai KPM, sementara warga tidak mampu tidak masuk dalam daftar KPM program sembako. Menurut Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambran: "Pada awal penyaluran tahun 2024 ada laporan dari Ketua RT, kalauarganya yang kurang mampu dan janda belum pernah mendapatkan program sembako, sedangkan tetangganya yang mempunyai usaha dan kelihatan mampu mendapatkan bantuan sosial program sembako." Beliau juga menambahkan bahwa: "KPM Program Sembako merupakan hasil dari musyawarah di Kelurahan yang diusulkan masuk dalam

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS melalui aplikasi SIKS-NG.”

Beberapa KPM program sembako juga masih mengalami kendala saat penarikan uang dari mesin ATM dan kurang pemahaman terhadap program sembako saat ini, sehingga uang bansos tidak dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini diungkapkan oleh JMT, salah satu KPM program sembako: “Kurangnya sosialisasi tentang program sembako, sehingga ada KPM yang membelanjakan uang bansos untuk membeli rokok, paket kuota dan barang-barang lain di luar kebutuhan pokok.”

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Program Sembako di Kelurahan Tambran Tahun 2024 tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan”. Penelitian ini akan berfokus pada ketepatan sasaran, sosialisasi program, manfaat dan tujuan program, serta pemantauan program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif subjek penelitian, menghasilkan data deskriptif berupa narasi atau ucapan. Sejalan dengan itu, I Made Winartha (2006:155) menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif berarti menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi maupun situasi dari data yang terkumpul. Data ini bisa berupa hasil wawancara atau pengamatan langsung mengenai masalah yang sedang diteliti di lapangan. Lebih lanjut, Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilaksanakan secara intensif, melibatkan partisipasi aktif peneliti di lapangan. Peneliti akan mencatat dengan cermat setiap kejadian dan melaksanakan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lokasi penelitian. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan efektivitas program sembako di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Fokus penelitian ini adalah efektivitas program sembako di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, menggunakan indikator-indikator menurut Budiani (2007:53). Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Lokasi penelitian ini dipilih karena Kelurahan Tambran pernah mendapatkan juara pada penilaian CPP (Citra Pelayanan Publik) tingkat Kecamatan Magetan dan pada tahun 2025 terpilih sebagai Perwakilan Peserta Kelurahan Cantik (Kelurahan Cinta Statistik) Tingkat Kabupaten Magetan. Selain itu juga didorong oleh indikasi adanya isu penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tambran, yang diduga timbul akibat perubahan mekanisme penyaluran dari nontunai (melalui e-Warung) menjadi tunai (melalui rekening KPM). Hal ini belum banyak dialami dalam

studi sebelumnya, sehingga penelitian ini berpotensi mengisi kesenjangan pengetahuan yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- Sumber Data Primer: Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data primer ini didapat dari Kantor Kelurahan Tambran, Pendamping Sosial Kecamatan, dan dari KPM bantuan Program Sembako di Kelurahan Tambran.
- Data Sekunder: Data sekunder adalah informasi pendukung yang relevan dalam penelitian, seperti peraturan tertulis maupun dokumen terkait dengan topik yang sedang diteliti. Arikunto (2013:22) menjelaskan bahwa data sekunder bisa berupa dokumen grafis (seperti catatan, SMS, tabel, notulen rapat, dan semacamnya), foto, rekaman video, film atau benda yang dapat memperkaya dan melengkapi data primer. Data sekunder di penelitian ini diperoleh dari arsip, dokumen, maupun laporan yang ada di Kantor Kelurahan Tambran, Pendamping Sosial Kecamatan dan dari KPM.

Subjek penelitian merujuk pada individu atau objek organisme yang menjadi sumber informasi penting untuk pengumpulan data (Puspitaningtyas, 2016). Senada dengan itu, Moleong (dikutip dalam Shofa, 2020) mengartikan subjek penelitian sebagai informan, yaitu pihak yang dimintai keterangan untuk memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bapak Didik Setiawan, S.E. sebagai Lurah di wilayah Kelurahan Tambran.
- Ibu Wiwik Setiyaningsih sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambran.
- Bapak Nanang Pujo Santoso sebagai Pendamping Sosial Kecamatan Magetan.
- Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program sembako di Kelurahan Tambran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Wawancara: Menurut Esterberg (2002), yang dikutip oleh Sugiyono (2015), wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang saling bertukar informasi maupun gagasan dalam sesi tanya jawab, tujuannya membangun pemahaman mendalam tentang suatu topik. Tujuan utama dari wawancara adalah mengumpulkan data atau informasi di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh narasumber. Informasi yang diperoleh dari proses ini tidak hanya mencakup data kuantitatif, tetapi juga persepsi, pengalaman, dan sudut pandang dari berbagai pihak yang relevan. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako, Pendamping Sosial Kecamatan Magetan dan

Pegawai Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

- Observasi: Menurut Nasution (1988), yang dikutip Sugiyono (2015), observasi sebagai dasar bagi seluruh ilmu pengetahuan. Secara bahasa, observasi berarti memperhatikan sesuatu atau seseorang dengan seksama. Tindakan ini melibatkan pengamatan mendalam terhadap kejadian yang berlangsung, dan berfungsi sebagai metode pengumpulan data untuk menarik kesimpulan atau diagnosis. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang kebetulan merupakan wilayah tempat tinggal peneliti.
- Dokumentasi: Menurut Sugiyono (2015), teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen (baik yang bersifat pribadi maupun resmi), yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa teks, gambar, atau karya-karya penting. Keunggulan utama data dokumenter adalah sifatnya yang tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari peristiwa atau data masa lalu. Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mendukung proses penelitian, misalnya dengan mengumpulkan jurnal atau artikel terkait Program Sembako, serta dokumentasi resmi dari berbagai instansi pemerintahan. Adapun data dokumentasi yang berhubungan dengan program sembako antara lain: Data kebijakan dan regulasi program (Peraturan Menteri Sosial, Kepala Daerah terkait atau pedoman pelaksanaan), data keluarga miskin yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Data laporan penyaluran bantuan atau catatan transaksi elektronik pada aplikasi SIKS-NG, data laporan monitoring dan evaluasi serta pengaduan.

Proses analisis data tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berlangsung bersamaan dengan tahap pengumpulan data hingga data dianggap memadai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan, Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020) membagi analisis data dalam tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Reduksi Data (Data Reduction): Reduksi data adalah tahapan di mana peneliti memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari catatan lapangan. Sebagai komponen penting dalam analisis, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengatur data agar nantinya kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi dengan lebih mudah.

- Penyajian Data (Data Display): Penyajian data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan pengolahan dan penataan informasi secara sistematis, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Pada penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam beragam bentuk, seperti uraian deskriptif, skema visual, atau representasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kategori yang ditemukan di lapangan.
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Kesimpulan merupakan intisari dari seluruh temuan penelitian, yang mempresentasikan pandangan akhir berdasarkan analisis sebelumnya. Kesimpulan ini terbentuk melalui penalaran induktif dan deduktif. Penting bagi kesimpulan yang dirumuskan untuk selaras dengan fokus penelitian, tujuan studi, dan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya.

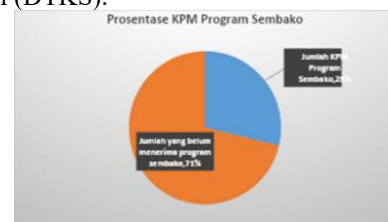
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan

Program Sembako adalah bentuk bantuan sosial pangan hasil dari transformasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebelumnya. Tujuan utama program sembako adalah meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima bantuan dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki akses lebih luas terhadap bahan pangan bergizi seimbang. (Kemensos RI, 2020).

1. Ketepatan Sasaran Program

Untuk memastikan apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak, setiap program memiliki sasaran yang akan dituju. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program adalah ketepatan sasaran program. Ketepatan sasaran program yaitu, menilai sejauh mana peserta yang terlibat dalam program benar-benar sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini penting dalam pelaksanaan program, sehingga dapat memastikan program berjalan dengan efektif. Lebih lanjut sasaran dari Program Sembako ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin dan rentan, sesuai dengan data yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Gambar 1. Prosentase KPM Program Sembako di Kelurahan Tambran

Berdasarkan data dan diagram tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ada 71% warga miskin dan yang sudah masuk DTKS Kelurahan Tambran namun belum menerima bantuan program sembako Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari para narasumber, warga yang menerima bantuan Program Sembako di Kelurahan Tambran adalah Kelompok Penerima Manfaat atau keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan.



Gambar 2. Dokumentasi survey usulan Program Sembako

Sumber: Dokumen Kelurahan Tambran, 2021

Data keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperoleh melalui usulan dari identifikasi Ketua RT terhadap warga di wilayahnya yang memenuhi kriteria, lalu diajukan ke Kelurahan dengan melengkapi berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat pengantar dari Ketua RT. Setelah berkas diterima, pihak Kelurahan bersama Pendamping Sosial Kecamatan akan melaksanakan verifikasi awal dengan cara mengecek kelengkapan berkas dan observasi langsung di lapangan. Hasil observasi ini untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak atau tidak layak diusulkan untuk masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sebagai KPM Program Sembako.

Di Kelurahan Tambran, jumlah keluarga miskin yang terdata dalam DTKS adalah 380 jiwa atau setara dengan 151 Kepala Keluarga. Namun, hanya 61 KPM (61 KK) yang saat ini menerima Program Sembako, masih ada 90 Kepala Keluarga yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan kewenangan Kelurahan terbatas pada pengusulan saja, sedangkan validasi data KPM Program Sembako menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Magetan, sementara penetapan final dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan KPM Program Sembako menunjukkan bahwa mereka memenuhi kriteria indikator kemiskinan lokal di Kabupaten Magetan (Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019). Akan tetapi, temuan ini hanya terbatas pada sampel

wawancara. Data hasil verifikasi awal secara menyeluruh terhadap seluruh KPM Program Sembako yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Pendamping Sosial Kecamatan belum diketahui oleh peneliti.

Dari beberapa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program sembako di Kelurahan Tambran belum efektif. Hal ini, terlihat dari masih adanya keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kelurahan Tambran, namun belum menerima program sembako. Meskipun menurut informan verifikasi awal di lapangan mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019, namun informasi mengenai data verifikasi awal secara menyeluruh terhadap seluruh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program sembako yang dilakukan oleh Kelurahan dan Pendamping Sosial Kecamatan belum diketahui. Sehingga hal tersebut, belum sesuai dengan indikator ketepatan sasaran program menurut oleh Budiani (2007:53), yaitu ketepatan sasaran program menilai sejauh mana peserta yang terlibat dalam program benar-benar sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan, bahwa ketepatan sasaran program sembako belum efektif karena data verifikasi awal secara menyeluruh belum diketahui dan masih ada kelompok sasaran yang belum mendapatkan program sembako.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program, untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Sosialisasi program merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu program.



Gambar 3. Dokumentasi Penyaluran Kartu ATM kepada KPM Program Sembako di Kantor Kecamatan Magetan

Sumber : Dokumen Pendamping Sosial, 2023

Dari informasi para narasumber pada saat wawancara, menunjukkan bahwa sosialisasi tentang program sembako telah dilakukan yaitu pada saat penyaluran kartu ATM kepada KPM, Pertemuan Pendamping Sosial Kecamatan bersama KPM, rapat Updating Kemiskinan di Kecamatan dan Rapat Koordinasi Kelurahan serta melalui media *Group WhatsApp* Penerima

Bantuan Program Sembako. Dalam sosialisasi tersebut juga telah dibahas tentang prosedur pelaksanaan program sembako, cara pengambilan rekening di ATM, dan bahan kebutuhan pokok apa saja yang dibelanjakan oleh KPM. Namun untuk tanggal penyaluran bantuan belum pasti tiap bulannya, sehingga mengakibatkan KPM mengalami kebingungan dan berulang kali mengecek saldo melalui ATM. Selain itu, tidak semua KPM penerima sembako diundang dan ikut hadir dalam sosialisasi program tersebut serta tidak semua penerima sembako masuk ke dalam Group WhatsApp Penerima Program Sembako.

Dari uraian penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa sosialisasi Program Sembako belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari ketidakpastian informasi tanggal penyaluran bantuan, kurangnya partisipasi KPM dalam sosialisasi program, dan terbatasnya akses informasi karena tidak semua penerima Sembako tergabung dalam grup WhatsApp. Oleh karena itu, informasi tentang pelaksanaan program belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat, terutama KPM Program Sembako. Hal tersebut belum selaras dengan indikator sosialisasi program yang diungkapkan oleh Budiani (2007:53), yaitu kemampuan penyelenggara program dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program, sehingga informasi terkait pelaksanaan program bisa diterima oleh masyarakat, terutama kepada sasaran peserta program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi program sembako belum efektif, sebab informasi mengenai pelaksanaan program sembako belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, khususnya oleh KPM Program sembako.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah dilihat dari seberapa sesuai hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Mendasar pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, tujuan dari program sembako ini adalah meringankan beban pengeluaran KPM Program Sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan, sebagai salah satu kebutuhan dasar, sekaligus memberikan fleksibilitas dan kontrol kepada KPM Program Sembako dalam memilih kebutuhan pangan mereka, serta berkontribusi pada upaya pencegahan stunting dengan pemenuhan gizi.



Gambar 4. Dokumentasi Penarikan Bantuan oleh KPM di Mesin ATM

Sumber : Dokumen Kelurahan Tambran, 2024

Berdasarkan informasi dari narasumber menunjukkan bahwa penyaluran dana program sembako secara langsung, masuk ke rekening Kelompok Penerima Manfaat (KPM) lewat transfer bank, secara signifikan telah mempercepat akses KPM terhadap bantuan. Dana bantuan yang diterima KPM program sembako dapat segera dibelanjakan di toko-toko kelontong terdekat tanpa harus melalui E-Warung sesuai dengan kebutuhan pangan mereka, sehingga mengurangi beban pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program sembako tidak lagi terikat pada paket sembako yang sudah ditentukan. Mereka memiliki keleluasaan dalam membeli beras dengan kualitas beras yang mereka inginkan, memilih telur segar, memilih sayur mayur dan lauk-pauk sesuai jumlah kebutuhan pangan keluarga. Fleksibilitas ini tidak hanya meningkatkan kepuasan KPM, tetapi juga mendorong adaptasi konsumsi pangan yang lebih baik sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan lokal di Magetan serta langkah maju dalam pemberdayaan KPM. Selain itu dana bantuan program sembako juga digunakan KPM untuk membeli makanan tambahan dan buah-buahan untuk balita agar gizinya tercukupi. Hal ini menunjukkan akses dana tunai yang fleksibel memberikan dampak positif langsung pada upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting di tingkat keluarga.

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan program sembako sudah efektif. Hal ini dilihat dari dana bantuan tunai yang diterima langsung ke rekening memberikan fleksibilitas bagi KPM untuk membeli kebutuhan pokok sesuai prioritas mereka, sehingga secara efektif meringankan tekanan finansial. Secara umum, program ini dirasakan memberikan dampak positif bagi kehidupan KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan pemenuhan gizi keluarga penerima manfaat.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program mengacu pada kegiatan pengawasan yang dilakukan selama atau setelah program berjalan, sebagai bentuk perhatian dan tindak lanjut terhadap peserta

Detail Data OTK NIK 35200641250001

Data Individu

Detail Data Individu

Bridge Point ini berisi :

No	Nama	Tempat	Tanggal	Periode	Status	Kat. SPOT
1	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
2	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
3	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
4	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
5	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
6	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
7	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
8	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
9	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi
10	NIK 35200641250001	NIK 35200641250001	2020/01/01	2020/01/01	Maternal	Salah Transaksi

Sumber : Dokumen Kelurahan Tambran, 2025

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemantauan pelaksanaan Program Sembako di Kelurahan Tambran sudah efektif. Efektivitas ini terlihat dari sudah adanya pertemuan yang dilaksanakan bersama KPM (Kelompok Penerima Manfaat), yang berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan, sebagai sarana monitoring yang berkelanjutan, dan sebagai verifikasi penyaluran dana bantuan sudah diterima KPM sesuai ketentuan, serta metode pengawasan tidak langsung berbasis tanya jawab telah berhasil mengarahkan KPM untuk tetap membelanjakan dana sesuai dengan tujuan dari program.

Simpulan

1. Berdasarkan ketepatan sasaran, pelaksanaan program sembako di Kelurahan Tambran belum efektif. Hal ini dikarenakan data verifikasi awal KPM program sembako secara menyeluruh belum diketahui dan masih ada kelompok sasaran yang belum mendapatkan program sembako.

- ## Saran

1. Selain melaksanakan verifikasi awal untuk data yang diusulkan, Pemerintah Kelurahan Tambran sebaiknya juga melakukan pembaruan data KPM secara berkala dengan mengacu pada DTKS terbaru cara dan observasi langsung ke lapangan guna memastikan KPM yang kondisi ekonominya sudah membaik dapat dinonaktifkan. Data hasil verifikasi awal ini perlu didokumentasikan dan dibuat file agar mudah diakses dan menjadi dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.

- ## DAFTAR PUSTAKA

103

- dan Lansia di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Publika*. Volume 12 Nomor 2, 511–520.
- Budiani, N. W. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Skripsi (Tidak diterbitkan)*. Universitas Udayana.
- Djpb.kemenkeu. 2020. *Indeks Manfaat Program Sembako*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fakhri, A. dan Ma’ruf, M. F. 2023. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Sidoharum. *Jurnal Publika*. Volume 11 Nomor 4, 2593–2608.
- Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ivana, M. 2020. Implementasi Ketepatan Waktu Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perijinan di Kabupaten Jember. *Skripsi (Tidak diterbitkan)*. Universitas Jember.
- Kemensos RI. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kemensos RI. 2023. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Pinontoan, F. 2020. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, F. M. 2021. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi (Tidak diterbitkan)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Purnama, R. 2022. *Efektivitas Program Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ratnawati, S., Julianti, I. S., dan Ismail. 2023. Evaluasi Program Peduli Dilan dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan bagi Kelompok Rentan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN)*. Volume 7 Nomor 2, 1–13.
- Sutanto, S. H., Jantika, F., Herlianti, N., dan Jauza, R. 2022. Reformasi Administrasi Pelayanan Berbasis Online pada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Reformasi Administrasi*. Volume 9 Nomor 1.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takbir, M. 2023. Evaluasi Kinerja Pegawai untuk Mewujudkan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 15 Nomor 1.
- Zulfikar dan Rozaili. 2022. Sumber Daya Manusia dalam Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ekobismen*. Volume 2 Nomor 1, 76–85.